

# Peranan Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Keselamatan Transportasi Angkutan Jalan dan Dampaknya Terhadap Perekonomian di Kabupaten Luwu Utara

Samrul <sup>1\*</sup>, Hapid <sup>2</sup>, Muhammad Hadis Badewi <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palopo, Jl. Sudirman No.Km. 03, Binturu, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia.

Email: samrulmsb12122000.20@gmail.com <sup>1\*</sup>, hapid@umpalopo.co.id <sup>2</sup>, muhammadhadisbadewi@gmail.com <sup>3</sup>

## Histori Artikel:

Dikirim 22 Mei 2025; Diterima dalam bentuk revisi 10 Juni 2025; Diterima 30 Juni 2025; Diterbitkan 1 Agustus 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

## Suggested citation:

Samrul, Hapid, & Badewi, M. H. (2025). Peranan Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Keselamatan Transportasi Angkutan Jalan dan Dampaknya Terhadap Perekonomian di Kabupaten Luwu Utara. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(4), 2281-2289. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i4.4329>.

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan keselamatan transportasi angkutan jalan serta dampaknya terhadap perekonomian di Kabupaten Luwu Utara. Keselamatan transportasi merupakan faktor penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, efisiensi distribusi barang, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan memiliki peran strategis dalam pengawasan, pengaturan, dan edukasi terkait keselamatan lalu lintas. Beberapa program yang telah dilaksanakan meliputi pengujian kendaraan bermotor, pemasangan rambu lalu lintas, penyediaan bus sekolah gratis, kampanye keselamatan, serta pembangunan infrastruktur pendukung. Namun, pelaksanaan program tersebut menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kondisi jalan yang belum memadai. Dampak dari peningkatan keselamatan transportasi mencakup efisiensi biaya transportasi, penurunan biaya sosial akibat kecelakaan, serta peningkatan produktivitas masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kolaborasi lintas sektor, peningkatan anggaran, penguatan kapasitas SDM, serta penggunaan teknologi pengawasan modern guna menciptakan sistem transportasi yang lebih aman dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Dinas Perhubungan; Keselamatan Transportasi; Angkutan Jalan.

## Abstract

This study aims to analyze the role of the Transportation Agency in improving road transportation safety and its impact on the economy in North Luwu Regency. Transportation safety is an important factor in supporting community mobility, efficient distribution of goods, and regional economic growth. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The results of the study indicate that the Transportation Agency has a strategic role in supervision, regulation, and education related to traffic safety. Several programs that have been implemented include motor vehicle testing, installation of traffic signs, provision of free school buses, safety campaigns, and development of supporting infrastructure. However, the implementation of these programs faces various obstacles such as budget constraints, low public awareness, and inadequate road conditions. The impact of improving transportation safety includes efficiency of transportation costs, reduction of social costs due to accidents, and increased community productivity. This study recommends the need for cross-sector collaboration, increased budget, strengthening of human resource capacity, and the use of modern surveillance technology to create a safer and more sustainable transportation system.

**Keyword:** Transportation Agency; Transportation Safety; Road Transportation.

## 1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses terstruktur yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara agregat di tingkat nasional. Kompleksitas skala pembangunan ekonomi menyebabkan evaluasi keberhasilannya menjadi tantangan tersendiri, terutama karena indikator utama yang digunakan yakni kesejahteraan bersifat kualitatif dan multidimensi. Kesejahteraan tidak dapat diukur secara sederhana, sebab mencakup berbagai aspek pembangunan, salah satunya adalah sektor lalu lintas dan angkutan jalan (Chendrawan, 2017). Lalu lintas dan angkutan jalan berperan vital dalam memperkuat integrasi nasional serta mendukung pembangunan di berbagai sektor, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai bagian integral dari sistem transportasi nasional, pengembangan sektor ini diperlukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, serta ketahanan nasional (Nariasih, Lemes, & Remaja, 2022). Upaya meningkatkan kualitas penduduk dan pembangunan berkelanjutan menuntut perhatian pada aspek transportasi yang memadai. Kualitas penduduk, yang mencakup kesehatan, pendidikan, produktivitas, serta ketahanan sosial, sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas transportasi yang aman dan efisien (Jamaludin, 2016). Di Kabupaten Luwu Utara, yang memiliki potensi besar di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan, ketersediaan jalur distribusi yang layak menjadi faktor penentu kelancaran pemasaran hasil produksi. Gangguan pada sektor transportasi, seperti kecelakaan atau kerusakan kendaraan, dapat secara langsung menurunkan pendapatan petani, pelaku usaha, serta UMKM (Sumule, 2020). Perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat telah mendorong pertumbuhan lalu lintas yang signifikan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mendefinisikan lalu lintas sebagai pergerakan kendaraan dan orang di ruang jalan, sedangkan ruang lalu lintas jalan mencakup seluruh prasarana yang diperuntukkan bagi pergerakan tersebut. Oleh karena itu, penataan sistem transportasi nasional harus mampu menyediakan layanan yang aman, teratur, efisien, dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat (Fadila *et al.*, 2024).

Aspek keselamatan menjadi kebutuhan mendasar dalam sektor transportasi. Peningkatan angka kecelakaan lalu lintas yang dilaporkan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa keselamatan pengguna jalan masih perlu mendapat perhatian serius (Ruktiningsih, 2017). Di wilayah dengan ketergantungan tinggi pada mobilitas, seperti Kabupaten Luwu Utara, keberadaan sistem transportasi jalan yang andal sangat memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, tantangan seperti tingginya angka kecelakaan, keterbatasan infrastruktur keselamatan, serta rendahnya disiplin pengguna jalan masih menjadi hambatan utama dalam mendukung distribusi ekonomi yang optimal. Peningkatan keselamatan transportasi angkutan jalan tidak hanya menurunkan angka kecelakaan, tetapi juga berpengaruh terhadap efisiensi distribusi, penurunan biaya logistik, serta perluasan akses ekonomi bagi masyarakat, khususnya di daerah terpencil. Kondisi transportasi yang aman memungkinkan masyarakat, pelaku usaha, dan petani mengakses pasar serta layanan publik secara lebih efektif, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi lokal. Dinas Perhubungan memiliki mandat penting dalam menjamin keselamatan transportasi, terutama melalui pengawasan, pengaturan, serta penegakan regulasi di sektor angkutan jalan. Lembaga ini bertanggung jawab merumuskan kebijakan, melakukan edukasi kepada masyarakat, serta mengawasi implementasi peraturan di lapangan (Putri, Wardhani, & Saptono, 2022). Namun, pemahaman masyarakat terhadap peran Dishub kerap kali terbatas pada aktivitas teknis di lapangan, seperti pengaturan lalu lintas atau pemasangan rambu. Ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan setiap pengguna jalan untuk berperilaku tertib serta mencegah segala hal yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas. Di Kabupaten Luwu Utara, sejumlah kecelakaan masih terjadi di jalur utama, terutama pada ruas yang infrastrukturnya belum memadai, minim penerangan, dan memiliki tingkat kepadatan lalu lintas tinggi (Fadila, Wulandari, & Masitoh, 2024). Tantangan peningkatan keselamatan angkutan jalan tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah. Keterlibatan masyarakat, khususnya dalam menaati peraturan lalu lintas dan menjaga kondisi kendaraan, sangat diperlukan. Kolaborasi antara Dinas Perhubungan, kepolisian, perusahaan angkutan, dan masyarakat menjadi syarat mutlak untuk menciptakan lingkungan

## RESEARCH ARTICLE

transportasi yang lebih aman dan tertib (Perdana & Pekanbaru, 2015). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis peran Dinas Perhubungan dalam peningkatan keselamatan transportasi angkutan jalan serta dampaknya terhadap perekonomian di Kabupaten Luwu Utara. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas program dan kebijakan yang telah dijalankan untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, sekaligus memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola transportasi demi keselamatan bersama (Yulaicho *et al.*, 2022).

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan keselamatan transportasi angkutan jalan di Kabupaten Luwu Utara serta dampaknya terhadap perekonomian daerah. Metode kualitatif dipilih karena dinilai paling tepat untuk mengeksplorasi isu-isu yang bersifat kontekstual dan kompleks, di mana pemahaman terhadap proses, makna, serta pengalaman para pelaku menjadi hal utama. Dalam konteks penelitian ini, subjek penelitian adalah para informan kunci yang dipilih secara purposif, meliputi pejabat yang berperan dalam koordinasi lapangan seperti Kepala Seksi Lalu Lintas Darat, Kepala Seksi Angkutan Darat, serta tiga orang anggota dari kedua seksi tersebut. Informan tersebut dipilih berdasarkan kapasitas dan kredibilitas mereka dalam memberikan data yang relevan dan mendalam terkait kebijakan serta implementasi keselamatan transportasi di lingkungan Dinas Perhubungan (Fadila, Wulandari, & Masitoh, 2024). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sangat beragam, mulai dari narasumber atau informan utama, peristiwa dan aktivitas yang diamati secara langsung, lokasi penelitian seperti kantor Dinas Perhubungan, terminal, hingga titik-titik rawan kecelakaan, serta dokumen, gambar, dan arsip yang mendukung analisis. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam secara semi-terstruktur kepada pegawai Dinas Perhubungan, pengemudi angkutan jalan, dan pakar keselamatan transportasi untuk mendapatkan gambaran utuh tentang perumusan, pelaksanaan, dan dampak kebijakan keselamatan transportasi. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi partisipatif dengan mengamati secara langsung aktivitas di lingkungan Dishub maupun di lapangan, misalnya pada proses pengawasan keselamatan di terminal atau pos pengamanan jalan. Untuk memperkuat temuan dari wawancara dan observasi, dilakukan pula analisis dokumen terhadap kebijakan, laporan evaluasi, serta arsip resmi yang berkaitan dengan keselamatan transportasi.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Luwu Utara dengan fokus pada Dinas Perhubungan sebagai objek utama. Rangkaian penelitian direncanakan berlangsung selama tiga bulan, yang mencakup satu bulan untuk penyusunan proposal, satu bulan pelaksanaan penelitian lapangan, dan satu bulan untuk pengolahan serta penyusunan hasil penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara yang berjumlah 202 orang. Dari populasi tersebut, sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling, dengan memilih 28 pegawai yang bekerja di bidang Lalu Lintas (lalin) karena dianggap paling relevan dan memiliki pengalaman signifikan terkait keselamatan transportasi jalan. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai efektivitas peran Dinas Perhubungan dalam mengelola keselamatan transportasi, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu Utara.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Hasil

Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara, beralamat di Unnamed Road, Baliase, Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang

RESEARCH ARTICLE

memegang peranan vital dalam pengelolaan urusan transportasi di wilayahnya. Dengan nomor telepon (0473) 21818, instansi ini menjadi garda terdepan dalam mendukung mobilitas masyarakat, barang, dan jasa, sekaligus berupaya menghadirkan pelayanan transportasi yang aman, nyaman, tertib, dan efisien. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Perhubungan memiliki wewenang untuk menerbitkan berbagai izin terkait transportasi, seperti izin usaha angkutan, izin trayek, kartu pengawasan angkutan penumpang umum, hingga Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT) dan Izin Operasi (SPIO) untuk Angkutan Taksi Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Semua regulasi dan perizinan ini dikelola guna memastikan kelancaran dan keteraturan lalu lintas di wilayah Kabupaten Luwu Utara. Tugas pokok Dinas Perhubungan secara umum meliputi perencanaan dan pengelolaan transportasi, pengawasan dan pengendalian lalu lintas serta angkutan jalan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi seperti terminal, pelabuhan, serta jembatan timbang, hingga pelayanan kepada masyarakat berupa pengujian kendaraan bermotor (uji KIR) dan pengelolaan perizinan angkutan. Selain itu, Dishub juga berperan dalam penegakan aturan transportasi melalui pengendalian operasional lalu lintas dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi, sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam upaya meningkatkan kualitas transportasi, Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara memprioritaskan sejumlah program unggulan, antara lain pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, pelayanan pengaturan lalu lintas di jalan, pengawasan terhadap angkutan barang dan penumpang yang melebihi kapasitas (ODOL), ramcek kendaraan angkutan penumpang, pengelolaan terminal dan trayek agar lebih efisien, serta edukasi dan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat melalui forum LLAJ. Namun, di balik berbagai program tersebut, Dishub dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan, seperti kondisi geografis Kabupaten Luwu Utara yang luas dan beragam—mulai dari kawasan pesisir, pegunungan, hingga sungai—yang memerlukan strategi transportasi khusus. Keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan lalu lintas juga menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi instansi ini. Ke depan, Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah, mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui pengelolaan transportasi yang efektif, serta mulai mengembangkan transportasi ramah lingkungan demi mendukung pembangunan berkelanjutan. Seluruh upaya ini sejalan dengan visi Dishub untuk menciptakan sistem transportasi yang aman dan berkelanjutan, yang juga mendukung visi dan misi pemerintah daerah, yakni “Luwu Utara Maju, Mandiri, dan Harmonis.” Misi Dishub sendiri meliputi penyediaan regulasi yang mendukung keselamatan transportasi, peningkatan pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum, serta penguatan sosialisasi keselamatan kepada masyarakat. Selain itu, misi ini juga beririsan langsung dengan misi pemerintah daerah, seperti pemulihan ekonomi dan infrastruktur, peningkatan daya saing daerah, serta pemenuhan infrastruktur secara berkelanjutan. Secara struktural, Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara memiliki unit kerja khusus yang menangani aspek keselamatan transportasi, seperti bidang pengawasan dan penegakan hukum. Program strategis seperti uji kelayakan kendaraan (uji KIR) dan kampanye keselamatan berlalu lintas secara rutin dijalankan untuk memastikan bahwa seluruh moda transportasi yang beroperasi di wilayah ini memenuhi standar keamanan dan kelayakan. Dengan demikian, Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara tidak hanya menjadi regulator, tetapi juga motor penggerak dalam membangun sistem transportasi yang mendukung kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



Gambar 1. Struktur Organisasi

## RESEARCH ARTICLE

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara terdiri dari berbagai bidang yang saling terintegrasi, mulai dari pengawasan, penegakan hukum, hingga pelayanan teknis, yang semuanya berperan penting dalam menjaga keselamatan transportasi angkutan jalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan analisis dokumen, diketahui bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas di wilayah ini masih tergolong tinggi. Beberapa faktor utama penyebab kecelakaan meliputi kondisi infrastruktur jalan yang kurang memadai, minimnya rambu-rambu keselamatan, banyaknya kendaraan yang tidak layak operasi akibat kelalaian dalam uji KIR, serta perilaku pengguna jalan yang kerap melanggar aturan dan membawa kendaraan melebihi kapasitas. Meski masyarakat mengaku memahami pentingnya keselamatan, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari masih jauh dari harapan. Dalam konteks ini, peran Dinas Perhubungan menjadi sangat krusial, mulai dari pengaturan dan penyusunan regulasi keselamatan transportasi seperti kewajiban uji KIR dan standar kelayakan kendaraan, hingga penyusunan pedoman keselamatan bagi pengemudi angkutan umum. Pengawasan juga dilakukan melalui inspeksi berkala terhadap kendaraan angkutan umum dan penindakan terhadap pelanggaran, termasuk kendaraan yang tidak memiliki izin operasi. Tak hanya itu, Dishub juga aktif dalam pendidikan dan sosialisasi melalui kampanye keselamatan jalan, seminar, penyuluhan di sekolah, serta penyebaran informasi tentang risiko kecelakaan dan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Dalam hal pengelolaan infrastruktur, upaya perbaikan jalan, pembangunan halte, pemasangan lampu lalu lintas, marka, dan rambu-rambu terus dilakukan demi menunjang keselamatan pengguna jalan.

Sejumlah program inovatif telah dijalankan, seperti penyediaan bus sekolah gratis yang menjadi solusi transportasi bagi pelajar, pengecatan marka Zona Selamat Sekolah (ZOSS) di depan SD Senter dan SD Katokkoan, pemasangan 92 lampu panel surya dari perbatasan Luwu-Luwu Utara hingga ke Luwu Timur sebagai bagian dari pemulihan pasca banjir bandang, serta pengaturan pengalihan arus lalu lintas saat perbaikan jembatan Masamba yang melibatkan koordinasi erat antara Dishub, SatLantas, dan instansi terkait. Selain itu, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi telah menjalani uji kelayakan secara berkala. Kegiatan sosialisasi keselamatan berkendara juga rutin dilakukan, terutama pada momen Operasi Keselamatan Pallawa 2024 yang menyasar komunitas pengemudi angkutan umum, dengan pemeriksaan surat-surat, sistem rem, dan komponen kendaraan secara menyeluruh. Upaya lain yang patut diapresiasi adalah pemasangan 40 unit rambu lalu lintas di titik strategis untuk meningkatkan keselamatan dan ketertiban di jalan raya, serta rapat koordinasi lintas sektor yang memastikan kelancaran penutupan dan pengalihan arus lalu lintas selama proyek infrastruktur berlangsung. Meski berbagai upaya telah dilakukan, Dinas Perhubungan tetap menghadapi sejumlah hambatan, seperti rendahnya kesadaran pengguna jalan akan pentingnya keselamatan, serta belum optimalnya fungsi jalan di beberapa kawasan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, strategi peningkatan keselamatan transportasi yang direkomendasikan meliputi penguatan kerja sama antarinstansi, penerapan teknologi pengawasan modern seperti kamera ETLE, kampanye keselamatan yang berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas SDM Dishub melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. Dengan pendekatan yang sistematis dan kolaboratif, diharapkan keselamatan transportasi angkutan jalan di Kabupaten Luwu Utara dapat terus meningkat, mendukung mobilitas masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah dalam jangka panjang.

Hasil wawancara dengan masyarakat Kabupaten Luwu Utara mengungkapkan apresiasi yang cukup tinggi terhadap peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan keselamatan transportasi angkutan jalan. Mayoritas responden menyoroti betapa pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan telah membantu pengendara lebih waspada, sehingga berkontribusi nyata pada penurunan angka kecelakaan. Tak hanya itu, kegiatan edukasi seperti kampanye keselamatan berkendara dan pelatihan hukum lalu lintas dinilai efektif menumbuhkan kesadaran akan pentingnya tertib berlalu lintas—meski, seperti biasa, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan klasik: antara tahu dan mau, kadang jaraknya bisa satu tikungan dan dua lampu merah. Masyarakat juga menilai Dishub berperan aktif dalam pembangunan serta pemeliharaan jalan, termasuk penyediaan fasilitas transportasi umum yang sangat membantu warga di daerah terpencil untuk mendapatkan akses yang lebih baik dan aman. Penilaian positif lain muncul pada aspek pengaturan lalu lintas. Penempatan petugas di titik rawan kemacetan dan



## RESEARCH ARTICLE

pengalihan arus saat perbaikan jalan dianggap sebagai langkah konkret yang memperlancar perjalanan, menghemat waktu, dan, tentu saja, mengurangi kadar amarah di jalan raya. Kebijakan subsidi serta regulasi tarif angkutan umum juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam menjaga efisiensi biaya transportasi harian. Tak kalah penting, pengawasan terhadap kendaraan umum melalui uji KIR dan ramp check menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. Upaya pengawasan emisi gas buang serta pemasangan lampu jalan tenaga surya pun diapresiasi, karena selain meningkatkan keselamatan di malam hari, juga membuat udara di sekitar lebih bersih—bonus yang jarang didapat dari kebijakan transportasi. Dampak sosial dan ekonomi pun terasa nyata. Sistem transportasi yang aman dan efisien memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang, mendorong pertumbuhan UMKM dan sektor pertanian lokal. Efek domino positif ini pada akhirnya menurunkan beban ekonomi keluarga dan pemerintah, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Bukan sekadar teori di atas kertas, masyarakat benar-benar merasakan perubahan, meski tentu saja masih ada ruang untuk perbaikan di sana-sini. Dari sisi kepolisian, data Satlantas Polres Luwu Utara menunjukkan tren penurunan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas dari 204 kasus pada 2023 menjadi 187 kasus di tahun 2024, turun sekitar 8%. Namun, ironisnya, jumlah korban meninggal justru naik tipis dari 41 menjadi 43 orang. Luka ringan akibat kecelakaan turun drastis, dari 339 kasus pada 2023 menjadi 250 pada 2024, atau turun 26%. Kasat Lantas Polres Luwu Utara, AKP AM Yusuf, menegaskan perlunya peningkatan penyuluhan di sekolah, mengingat korban meninggal dari kalangan pelajar masih tercatat. Upaya sosialisasi tertib lalu lintas di sekolah setiap hari Senin pun digalakkan, agar generasi muda tidak hanya paham teori, tetapi juga praktik keselamatan di jalan.

Secara ekonomi, peningkatan keselamatan transportasi membawa dampak signifikan. Efisiensi biaya transportasi tercapai lewat optimalisasi distribusi barang dan orang, yang pada gilirannya menurunkan ongkos produksi, mempercepat distribusi, dan meningkatkan daya saing produk lokal. Pengurangan kecelakaan otomatis menurunkan biaya perawatan korban, kerusakan kendaraan, dan kehilangan produktivitas, sehingga anggaran dapat dialihkan ke sektor yang lebih produktif seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Tak heran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Luwu Utara menunjukkan tren naik: dari Rp16,05 triliun pada 2022, Rp17,84 triliun di 2023, diperkirakan Rp18,92 triliun pada 2024, dan melonjak ke Rp20,15 triliun di 2025. Pertumbuhan ekonomi pun stabil di kisaran 5-5,75% per tahun. Investasi infrastruktur juga terus meningkat, dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi penyumbang utama PDRB, disusul konstruksi serta perdagangan besar dan eceran. Diskusi hasil penelitian menegaskan bahwa peran strategis Dinas Perhubungan tidak bisa diremehkan. Mulai dari pengaturan, pengawasan, edukasi, hingga penyediaan infrastruktur, program-program Dishub seperti bus sekolah gratis, pemasangan rambu, pengecatan marka, pengujian kendaraan bermotor, hingga kampanye keselamatan lalu lintas, terbukti membawa perubahan positif. Meski demikian, efektivitas program ini masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, infrastruktur yang belum optimal di wilayah terpencil, serta keterbatasan SDM dan teknologi. Masyarakat dan pihak kepolisian sama-sama mengapresiasi kerja Dishub, terutama dalam pengelolaan arus lalu lintas dan pelayanan transportasi umum yang pro-rakyat. Dari kacamata teori, temuan ini mengafirmasi teori ekonomi transportasi yang menyatakan bahwa sistem transportasi yang aman dan efisien akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui mobilitas barang dan orang yang lebih cepat, aman, dan murah. Hal ini juga sejalan dengan teori keselamatan transportasi Lawson (2009), yang menempatkan regulasi, infrastruktur, dan perilaku pengguna sebagai tiga pilar utama keselamatan transportasi. Kabupaten Luwu Utara, dengan segala dinamikanya, sedang membuktikan bahwa teori tersebut bukan sekadar wacana, melainkan bisa diwujudkan lewat kerja kolaboratif, inovasi, dan respons cepat terhadap tantangan di lapangan.

### 3.2 Pembahasan

Hasil penelitian mengenai peran Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara dalam meningkatkan keselamatan transportasi angkutan jalan dan dampaknya terhadap perekonomian daerah memperkuat temuan-temuan dari studi sebelumnya, namun juga menampilkan beberapa perbedaan kontekstual yang menarik untuk dicermati. Penelitian ini sejalan dengan temuan Nariasih, Lemes, dan Remaja (2022) yang

## RESEARCH ARTICLE

menekankan pentingnya peran Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan program keselamatan transportasi darat berdasarkan regulasi pemerintah. Kedua penelitian sama-sama menyoroti bahwa aspek pengawasan, pengaturan, serta edukasi kepada masyarakat merupakan fondasi utama dalam menciptakan sistem transportasi yang aman. Namun, pada konteks Kabupaten Luwu Utara, penekanan terhadap program-program berbasis kebutuhan lokal, seperti penyediaan bus sekolah gratis dan pemasangan lampu jalan panel surya pasca-bencana, menjadi keunikan tersendiri yang tidak banyak ditemukan dalam penelitian daerah lain. Studi Fadila, Wulandari, dan Masitoh (2024) mengenai strategi komunikasi Dinas Perhubungan Kota Cilegon juga menemukan bahwa keberhasilan program keselamatan transportasi sangat dipengaruhi oleh efektivitas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Penelitian di Luwu Utara mendukung hal ini, di mana kampanye keselamatan, penyuluhan di sekolah, dan pelibatan komunitas pengemudi terbukti meningkatkan kesadaran akan pentingnya tertib berlalu lintas. Namun, penelitian ini menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan kepolisian dan pemerintah daerah, menjadi faktor determinan dalam mengatasi tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur yang dihadapi daerah-daerah terpencil. Temuan Putri, Wardhani, dan Saptono (2022) di Kabupaten Pati menyoroti bahwa pemahaman masyarakat terhadap fungsi Dinas Perhubungan kerap terbatas pada tugas-tugas teknis lapangan. Hal serupa juga ditemukan di Luwu Utara, di mana sebagian masyarakat baru mulai memahami peran strategis Dishub setelah adanya program-program nyata yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari, seperti pengadaan bus sekolah dan penataan marka jalan. Berbeda dengan studi di Pati yang lebih fokus pada aspek penegakan aturan, penelitian ini menonjolkan dimensi pemberdayaan masyarakat dan upaya membangun kepercayaan publik melalui pelayanan transportasi yang inklusif.

Jika dibandingkan dengan penelitian Sumule (2020) yang meneliti dampak kebijakan manajemen transportasi darat di Biak Numfor, terdapat benang merah bahwa peningkatan keselamatan transportasi berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi lokal. Kedua penelitian menemukan bahwa efisiensi biaya transportasi, penurunan angka kecelakaan, serta kemudahan akses pasar bagi pelaku usaha kecil menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun, penelitian di Luwu Utara memperlihatkan data yang lebih detail terkait pertumbuhan PDRB dan investasi infrastruktur, serta menyoroti peran Dishub dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi pasca-bencana. Selain itu, penelitian ini mengafirmasi teori keselamatan transportasi yang dikemukakan oleh Lawson (2009) dan Li & Tinjauan Pustaka (2004), yaitu bahwa keselamatan transportasi bertumpu pada sinergi antara regulasi, infrastruktur, dan perilaku pengguna jalan. Dalam konteks Luwu Utara, ketiga pilar ini diimplementasikan melalui kebijakan uji KIR, pembangunan infrastruktur pendukung, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat. Secara umum, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi temuan-temuan sebelumnya, tetapi juga menawarkan kontribusi baru berupa penekanan pada pentingnya adaptasi program keselamatan transportasi terhadap kebutuhan lokal, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta perlunya inovasi dalam pemanfaatan teknologi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkaya wacana akademik terkait peran Dinas Perhubungan dalam menciptakan sistem transportasi yang aman dan berkelanjutan, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

#### 4. Kesimpulan dan Saran

Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara terbukti memegang peranan sentral dalam upaya peningkatan keselamatan transportasi angkutan jalan. Melalui pengawasan ketat, pengaturan lalu lintas yang adaptif, edukasi berkelanjutan, dan pembangunan infrastruktur, Dishub meluncurkan berbagai program strategis seperti penyediaan bus sekolah gratis, pemasangan rambu-rambu, kampanye keselamatan, dan pengujian kendaraan bermotor. Meski dihadapkan pada tantangan klasik berupa keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, serta infrastruktur yang belum merata di wilayah terpencil, program-program tersebut telah menunjukkan efektivitas dalam menekan angka kecelakaan dan meningkatkan efisiensi transportasi. Implikasi positifnya tidak hanya dirasakan pada

## RESEARCH ARTICLE

aspek keselamatan, tetapi juga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah tercermin dari peningkatan PDRB, efisiensi biaya transportasi, penurunan biaya kecelakaan, hingga kenaikan produktivitas masyarakat. Keberhasilan ini tentu bukan hasil kerja satu pihak semata. Partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi lintas sektor, mulai dari kepolisian, pemerintah daerah, hingga elemen masyarakat lainnya, menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan. Dengan sinergi yang terus diperkuat, Kabupaten Luwu Utara berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus peningkatan kualitas hidup warganya.

## 5. Ucapan Terima Kasih

Dengan penuh rasa syukur, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti; kepada saudara dan seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat dan motivasi; serta kepada dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan arahan berharga selama proses penelitian ini. Tanpa dukungan, doa, dan bantuan dari semua pihak tersebut, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

## 6. Referensi

- Armi, M., Ananda, M., Aditi, B., & Pentana, S. (2023). Stres kerja ditinjau dari konflik peran ganda, kelelahan emosional dan dukungan sosial serta dampaknya terhadap komitmen organisasi pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 3(3), 974–996. <https://doi.org/10.47467/visa.v3i3.5340>.
- Burhanudin, M. A., Jumiaty, I. E., & Rahmawati, R. (2018). *PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM OPTIMALISASI FUNGSI TERMINAL BALARAJA KABUPATEN TANGERANG (PERIODE 2016-2017)* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Chendrawan, T. S. (2017). Sejarah pertumbuhan ekonomi. *Tirtayasa Ekonomika*, 12(1), 123. <https://doi.org/10.35448/jte.v12i1.4441>.
- Dhuge, M. M., & Larasati, D. C. (2019). Peran Dinas Perhubungan dalam implementasi Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 tentang tarif angkutan umum. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(4), 255–260.
- Fadila, Y., Wulandari, C., & Masitoh, S. (2024). STRATEGI KOMUNIKASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON DALAM MENINGKATKAN KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT DI KOTA CILEGON. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 14(1), 15-26.
- FAUZIA, Y. (2022). *PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENETAPAN ZONA WILAYAH OPERASI TRANSPORTASI ONLINE DI DIY* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Jamaludin, A. N. (2016). Sosiologi pembangunan.
- Nariasih, L. P., Lemes, I. N., & Remaja, I. N. G. (2022). Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Dalam Pelaksanaan Program Keselamatan Perhubungan Darat Berdasarkan Peraturan



## RESEARCH ARTICLE

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan. *Kertha Widya*, 10(1), 45-75. <https://doi.org/10.37637/kw.v10i1.1034>.

Perdana, R., & Wicaksono, B. (2016). *Peran Dinas Perhubungan Bidang Perhubungan Darat dalam Penyelenggaraan dan Perencanaan Pelabuhan Penyeberangan Ro-ro di Kabupaten Bengkalis Tahun 2015* (Doctoral dissertation, Riau University).

Putri, E. M., Wardhani, L. T. A. L., & Saptono, H. (2022). Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Dalam Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Pati. *Diponegoro Law Journal*, 11(1). <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.32903>.

Ruktiningsih, R. (2017). Analisis tingkat keselamatan lalu lintas Kota Semarang. *G-Smart*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.24167/gv.v1i1.919>.

Sumule, P. K. (2020). Dampak kebijakan manajemen transportasi darat terhadap perekonomian masyarakat Biak Numfor. *Gema Kampus" IISIP YAPIS Biak*, 16(1), 33–45.

Yulaicho, M. R., Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik. (2022). Joyoboyo Kota Surabaya.